



## PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM MEMASUKI DUNIA KERJA DI PROVINSI GORONTALO

Mahyudin Humalangi, SE, M.Si

### Ringkasan Eksekutif

Sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan tenaga kerja berkualitas bagi Provinsi Gorontalo sehingga memberikan efisiensi dan efektifitas dalam berproduksi. Serta memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang berkualitas dalam mengisi lapangan kerja yang sesuai lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Gorontalo. Ada banyak sekolah vokasi di Provinsi Gorontalo namun belum efektif dalam memberikan kontribusi dalam kebutuhan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. Salah satu diantaranya diduga karena lulusan SMK semakin banyak dan tidak berbanding lurus dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.

Belum optimalnya kemampuan/keterampilan yang diperoleh dari jenjang pendidikan SMK berakibat keterampilan yang diperoleh belum sesuai atau belum bisa diterapkan langsung dengan kondisi/permintaan pasar kerja. Policy Brief ini untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dengan beberapa butir rekomendasi yaitu : 1) Dinas terkait perlu melakukan review atas proses pengurusan izin penyelenggaraan/pembukaan program studi di SMK. 2) Dalam mendesain program/kegiatan yang terkait dengan pengembangan SMK, Dinas Pendidikan perlu melakukan penyusunan skala prioritas bidang keahlian yang akan diintervensi. 3) Perlu disusun masterplan pengembangan penyelenggaraan pendidikan SMK dengan memperhatikan keterlibatan seluruh stakeholder.

*Kata Kunci : Pendidikan, Sekolah, Kerja*

### Pendahuluan

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat dapat menekan pasar kerja terutama jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Akibat dari hal ini adalah munculnya tenaga kerja yang tidak tertampung pada lapangan pekerjaan. Pengangguran merupakan isu yang hangat dibicarakan dalam bisnis dan perekonomian suatu negara. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin kuat modal yang menggerakkan roda pembangunan. Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus berubah seiring dengan berlangsungnya proses demografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan

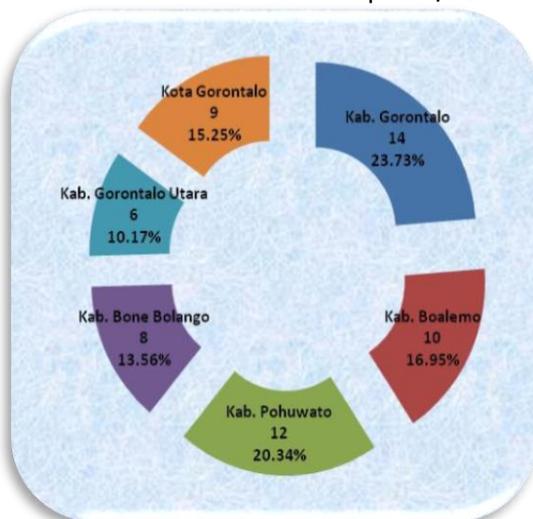
kesehatan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo per Februari 2024 berdasarkan rilis BPS berada di kisaran 3,05%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan TPT pada periode Agustus 2023 yang sebesar 3,06%.

Lulusan yang diperoleh dari SMK masih belum sepenuhnya relevan dengan lapangan kerja yang tersedia. Di duga bahwa banyaknya lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja.

### Deskripsi Masalah

1. Dinas terkait belum melakukan review atas proses pengurusan izin penyelenggaraan/ pembukaan program studi di SMK. Dalam gambar dibawah ini dapat dilihat jumlah SMK di wilayah Provinsi Gorontalo sebanyak 59 unit sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Daerah yang memiliki SMK terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah SMK sebanyak 14 sekolah (23,73%) dan Kabupaten Pohuwato sebanyak 12 sekolah (20,34%).

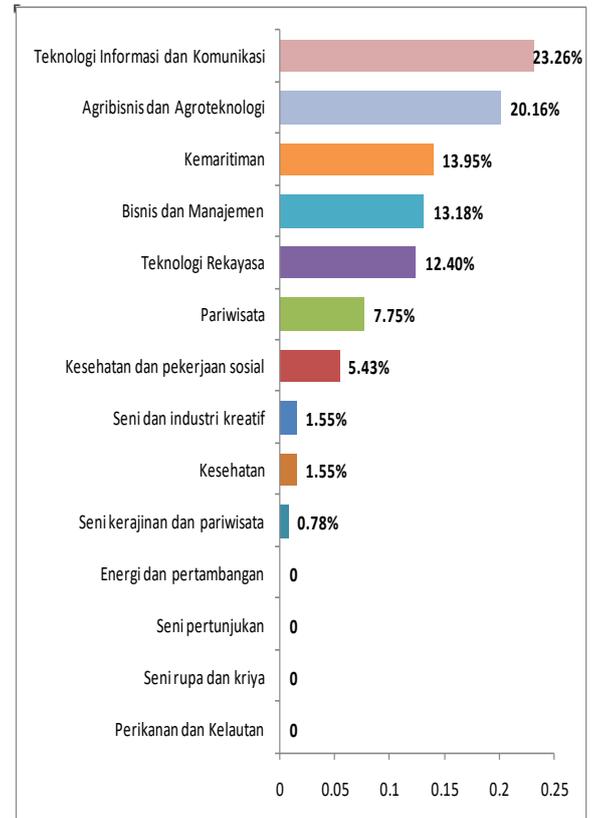
Gambar 1 : Jumlah SMK Per Kabupaten/Kota



(Sumber BPS Provinsi Gorontalo).

2. Dinas terkait belum melakukan penyusunan skala prioritas bidang keahlian yang akan diintervensi. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat SMK berdasarkan 14 bidang keahlian, bidang keahlian yang banyak diselenggarakan di Provinsi Gorontalo adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi (23,26%), bidang agribisnis dan agroteknologi (20,16%), bidang kemaritiman (13,95%) serta bidang bisnis dan manajemen (13,18%).

Gambar 2 : Jumlah SMK berdasarkan Bidang Keahlian



Sumber BPS Provinsi Gorontalo).

3. Belum tersusunnya masterplan pengembangan penyelenggaraan pendidikan SMK. Sebab masterplan tersebut dibutuhkan untuk meletakkan visi SMK kedepan lebih akurat dan terukur.

### Kebijakan yang disasar

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

### Rekomendasi Kebijakan

1. Dinas terkait perlu melakukan review atas proses pengurusan izin

penyelenggaraan/pembukaan program studi di SMK.

Rekomendasi ini menjadi prioritas utama karena diperlukan untuk meminimalisir terjadinya excess supply tenaga kerja pada bidang keahlian tertentu sehingga dapat mengoptimalkan lulusan SMK yang dihasilkan.

2. Dalam mendesain program/kegiatan yang terkait dengan pengembangan SMK, Dinas Pendidikan perlu melakukan penyusunan skala prioritas bidang keahlian yang akan diintervensi.

Rekomendasi ini mendorong adanya intervensi yang dilakukan bisa meningkatkan kualitas lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja. Sebagai contoh, sesuai keselarasan dengan struktur ekonomi maka sebaiknya memprioritaskan bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi sehingga program/kegiatan yang diselenggarakan berfokus pada penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di bidang keahlian ini.

3. Perlu disusun masterplan pengembangan penyelenggaraan pendidikan SMK dengan memperhatikan keterlibatan seluruh stakeholder.

Rekomendasi ini mendorong tersusunnya masterplan yang nantinya diharapkan jadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Provinsi Gorontalo.